



# Setop Eksploitasi Air Tanah

## ■ Sharing Sumur Dalam Dinilai Merugikan



Ini adalah pembodohan dan pelegalan pembangunan air sumur dalam. Asalkan mereka memberikan 10 persen airnya Dodok Putra Bangsa

YOGYA, TRIBUN - Aktivistis gerakan Jogja Asat dan kalangan legislatif meminta pemerintah kota (Pemkot) serius dalam membendung masifnya pembangunan hotel dan apartemen di Kota Yogyakarta. Peralunya, kelestarian air tanah menjadi taruannya jika pemerintah b a -

ngunan hotel terus digencarkan.

Aktivistis gerakan Jogja Asat, Dodok Putra Bangsa, menilai pembangunan hotel di Yogyakarta sungguh sangat masif. Dia pun mengkhawatirkan jika tidak ada pembatasan akan berakibat pada kelestarian air di kota setempat.

"Warga Kota Yogya itu mayoritas menggantungkan air tanah untuk kehidupan. Bahkan, tidak doyan mengonsumsi air PDAM karena aroma kaporit dan air tidak mengalir lancar," jelasnya, akhir pekan lalu.

● ke halaman 14

### Selamatkan Air Tanah

Aktivistis gerakan Jogja Asat menilai kelestarian air tanah menjadi taruannya jika pembangunan industri tak dibendung.

- Peralunya, kebanyakan warga menggunakan air tanah sebagai sumber kehidupan sehari-hari.
- Sedangkan kondisi air tanah terancam jika terus dieksploitasi menggunakan sumur dalam oleh pelaku industri hotel dan lainnya.
- Sharing 10% air sumur dalam oleh industri kepada warga sekitar dianggap hanya bentuk pelegalan pembangunan sumur dalam.
- Kepala DLH Kota Yogya menyatakan kondisi air tanah masih cukup aman meski memasuki musim kemarau.
- Topografi Kota Yogya yang merupakan cekungan menjadikannya sebagai penampung air.
- Ada tiga sumur pantau air tanah dalam, di Tegalluh, Paer Satewa dan Taman Hias Yogyakarta, dan Balekeja.
- Air tanah dalam mengalami fluktuasi, berkurang dua meter pada musim kemarau dan kembali ke ketinggian normal saat musim hujan.

## Setop Eksploitasi

● Sambungan Hal 13

Dengan latar belakang tersebut, menurutnya, jika kelestarian air tanah terancam maka warga setempat akan terancam. Dia mengatakan, hal ini tak lepas dari kebijakan pemkot yang dinilai longgar pada pembangunan hotel, apartemen dan industri lainnya.

"Pembangunan yang masif tidak memandang dan mengutamakan manusia bisa dipastikan menyengsarakan," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, warga Miliran ini pun menilai pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengenai *sharing* 10 persen air tanah dalam untuk warga sekitar dari hotel atau industri adalah bentuk pembodohan. Justru dengan peraturan tersebut, hotel bisa bebas menghabiskan air tanah.

"Ini adalah pembodohan dan pelegalan pembangun-

an air sumur dalam. Alasan mereka memberikan 10 persen airnya," jelasnya.

Dodok pun mempertanyakan jika air tanah habis dan pengusaha hotel pindah tempat. Namun, tidak mempedulikan nasib warga yang bergantung pada air tanah. "Di sini, ada dampak dan nantinya mereka seolah tidak bersalah," ulasnya.

Dodok pun sempat mencontohkan sejak pendirian salah satu hotel, sumur warga Miliran mengering. Menurut Dodok, sejak hotel beroperasi 2012 silam, sumur warga menjadi kering. Namun, saat meminta klarifikasi Badan Lingkungan Hidup (BLH), sekarang DLH, malah berargumen membenarkan operasional hotel, karena dinilai sudah tepat mengambil sumber air dalam yang tidak akan mengganggu air sumber air dangkal masyarakat.

"Padahal jelas-jelas sumur warga terdampak menjadi kering. Ini contoh nyata. Jadi ka-

lau ada pernyataan air tanah masih aman, itu karena habis musim hujan," tegasnya.

### Pengawasan

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto meminta pemkot lebih memperketat pengawasan dan pembatasan dalam pembangunan sumur dalam bagi hotel. Pembangunan sumur dalam ini, ujarnya jangan sampai justru berdampak pada sumur warga.

"Kami meminta pengawasan dilakukan secara maksimal. Pembatasan jarak dan debit juga perlu, agar tidak membawa bencana kekeringan," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Senada, Direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY, Halik Sandera meminta pembatasan pembangunan skala besar di wilayah perkotaan, agar pemanfaatan air tanah tidak melampaui daya dukungnya. Pasalnya, penggunaan air tanah dalam

oleh industri dalam jangka panjang bisa berakibat pada penurunan muka air tanah dan muka tanah.

"Informasi yang sudah dirilis pemerintah bahwa sudah ada penurunan muka air tanah 20-30 sentimeter per tahun, membuktikan bahwa pemanfaatan air tanah di Yogyakarta sudah melebihi daya dukung. Maka, harus ada pembatasan pemanfaatan air tanah ini untuk industri," ujarnya.

Dia pun mendesak agar pemerintah kota setempat menyusun alokasi air. Karena, hal ini akan menentukan berapa jumlah industri dan bangunan skala besar yang boleh berdiri di Kota Yogyakarta. Aspek lainnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota setempat adalah adanya perencanaan tata ruang yang memang harus dipastikan keseimbangan. "Sehingga daya dukung dan data tampung lingkungannya tidak terlampaui," imbuhnya. (ais)

## Suyana: Jangan Khawatir

**MEMASUKI** musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta menyebut kondisi air tanah di wilayah ini masih cukup aman. Masyarakat diminta tidak khawatir dengan kondisi air tanah dalam karena digunakan oleh hotel dan industri. Kepala DLH Kota Yogya-

karta, Suyana menjelaskan, faktor yang membuat kondisi air tanah di wilayah ini masih cukup baik adalah topografi Kota Yogyakarta. Menurutnya, Kota Yogyakarta berada di cekungan yang menjadikan wilayah ini sebagai penampung air.

● ke halaman 14

### Suyana: Jangan

● Sambungan Hal 13

"Kota Yogyakarta itu punya cadangan air bagus nomor dua setelah Madiun karena topografinya cekungan. Jadi jangan khawatir," ulas Suyana, belum lama ini.

Dia menyebut, sejauh ini ada tiga sumur pantau air tanah dalam yang ada di Tegalturi, Pasar Satwa dan Taman Hias Yogyakarta (Pashy), dan di Balirejo yang berada di bagian utara Yogyakarta. Pemantauan dilakukan setiap hari.

"Dari hasil pantauan yang sudah dilakukan, ketinggian air tanah dalam mengalami fluktuasi yaitu berkurang hingga dua meter pada saat musim kemarau dan kembali ke ketinggian normal pada saat musim hujan," jelasnya.

Pihaknya juga menyatakan tidak bisa memonitor ketinggian air di sumur pantau Pashy karena airnya meluap. Padahal, kedalaman sumur pantau ini bisa mencapai 100 meter. Hal ini, kata dia, artinya, kondisi air tanah dalam di Kota Yogyakarta cukup baik.

Di sisi kebijakan, pihaknya

menerapkan aturan dalam pembangunan sumur dalam untuk melindungi cadangan air tanah di Kota Yogyakarta. Di antaranya adalah dengan melakukan pengaturan jarak antarsumur dan pembatasan debit air.

Dia mencontohkan, di wilayah Kecamatan Gondoman sudah diterapkan aturan pembangunan sumur dalam. Beberapa aturan yang wajib dipenuhi yaitu jarak antar sumur minimal 75 meter. Selain itu, pengambilan air dari air sumur dalam juga dibatasi yaitu maksimal tiga liter per detik. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005